

Evaluasi Penerapan Peraturan Bupati Brebes No. 61 Tahun 2019 di Kantor Kecamatan Larangan Pemerintah Kabupaten Brebes

Oleh:
Zulfah Nurliza Hariyanto
5160111063

Penulisan ini bertujuan untuk Mengetahui prosedur penatausahaan pengeluaran yang sedang berjalan saat ini di Kantor Kecamatan Larangan Pemerintah Kabupaten Brebes Mengevaluasi pelaksanaan prosedur penatausahaan pengeluaran dan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran di Kantor Kecamatan Larangan Pemerintah Kabupaten Brebes sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes No. 61 tahun 2019. Berdasarkan pemeriksaan inspektorat Kabupaten Brebes pada kantor kecamatan larangan terdapat temuan terhadap bendahara pengeluaran pada laporan keuangan yang tidak disertai SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) temuan ini hampir setiap tahun terjadi, itupun rata-rata kesalahan administrasi. Inspektorat memberikan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) kepada Kantor Kecamatan Larangan yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang telah di tentukan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Serta metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif deskripsi. Hasil penulisan menunjukan bahwa: Proses penatausahaan pengeluaran di Kantor Kecamatan Larangan Pemerintah Kabupaten Brebes terdiri dari pengajuan SPP, prosedur penerbitan SPM, prosedur penerbitan SP2D, prosedur SPJ keuangan bendahara pengeluaran, dan prosedur penggunaan dana bendahara pengeluaran pembantu: Pada Kantor Kecamatan Larangan Pemerintah Kabupaten Brebes pelakasaan penatausahaan pengeluaran belum 100% (seratus persen) belum terlaksana dengan baik, dari 20 (dua puluh) prosedur penatausahaan bendahara pengeluaran sudah 11 (sebelas) yang sesuai atau 55% (lima puluh lima persen) yang terlaksana sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes No. 61 tahun 2019.

Kata kunci: SPP, SPM, SP2D, SPJ.

Evaluation of Regulation of the Regent implementation of Brebes No. 61 Year 2019 in Sub-district Office of Larangan Brebes Regency Government

Zulfah Nurliza Hariyanto
5160111063

This writing aims to find out the current expenditure administration procedures in the District Office of the Brebes Regency Government and evaluate the implementation of the expenditure administration procedures and the accountability of the expenditure treasurers at the District Office of Larangan, the Government of Brebes Regency in accordance with the Regulation of the Regent of Brebes No. 61 of 2019. Based on the inspection of the Brebes Regency inspectorate at the sub-district office, there are findings on the treasury of spending on financial reports that are not accompanied by an SPJ (Letter of Accountability) This finding occurs almost every year. The inspectorate provides an LHP (Inspection Result Report) to the Larangan District Office which must be fulfilled within a predetermined time. The data collection method used in this writing is by conducting interviews and documentation. The data analysis method used is descriptive qualitative data analysis method. The results of the writing show that the process of administering expenditures at the District Office of Larangan, the Government of Brebes Regency, consists of filing SPP, SPM issuance procedures, SP2D issuance procedures, spending treasury SPJ procedures, and procedures for the use of treasurer spending funds. Brebes District is not yet 100% (one hundred percent) well implemented. From the 20 (twenty) procedures for administering the expenditure treasurer, 11 (eleven) are in accordance or 55% (fifty five percent) which have been implemented in accordance with the Regulation of the Regent of Brebes No. 61 in 2019.

Keywords: SPP, SPM, SP2D, SPJ.